

---

## Analisis Efisiensi Pengeluaran Publik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Armin Rahmansyah Nasution<sup>1</sup>, Yosua Simanjuntak<sup>2</sup>, Tia Handani<sup>3</sup>, Rafael Benediktus<sup>4</sup>,  
Fadhil Irfansyah<sup>5</sup>, Aisyah Fadhillah Lubis<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

E-mail: armin@unimed.ac.id<sup>1</sup>, josuabntang@gmail.com<sup>2</sup>, tiahdn30@gmail.com<sup>3</sup>, mccword@gmail.com<sup>4</sup>,  
fadhilirfansyah212@gmail.com<sup>5</sup>, aisyahfadillah12456@gmail.com<sup>6</sup>

---

### Article History:

Received: 02 Desember 2024

Revised: 27 Desember 2024

Accepted: 30 Desember 2024

**Keywords:** Pendidikan, IPM, Pembangunan SDM

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara efisiensi pengeluaran publik dalam bidang pendidikan dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan studi pustaka. Kajian ini difokuskan pada evaluasi sistematis berbagai literatur terkait alokasi anggaran dalam bidang pendidikan dan dampaknya terhadap pembangunan manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan kajian literatur yang komprehensif. Diketahui bahwa efisiensi pengeluaran publik dalam bidang pendidikan memiliki korelasi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa optimalisasi alokasi anggaran pendidikan tidak sekadar memengaruhi kuantitas, melainkan juga kualitas layanan pendidikan yang berdampak langsung pada peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa strategi efisiensi pengeluaran publik yang tepat dapat menjadi upaya utama dalam mentransformasi potensi pendidikan menjadi modal pembangunan manusia yang berkelanjutan.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi penting dalam proses pembangunan manusia dan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan publik di berbagai negara. Upaya peningkatan kualitas pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang dapat mendukung pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, alokasi pengeluaran publik di sektor pendidikan berperan sebagai alat penting yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Anggaran tersebut difokuskan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan menjamin pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. SDM berkualitas ini akan bergabung dalam pasar tenaga kerja, berkontribusi pada struktur ekonomi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Cobb & Douglas (1928) menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam fungsi

produksi. Dalam konteks ini, sistem pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten harus selaras dengan kebutuhan pasar dan dinamika perkembangan zaman. Pendidikan adalah faktor utama dalam perekonomian karena dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. SDM berkualitas ini akan bergabung dalam pasar tenaga kerja, berkontribusi pada struktur ekonomi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Cobb & Douglas (1928) menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam fungsi produksi. Dalam konteks ini, sistem pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten harus selaras dengan kebutuhan pasar dan dinamika perkembangan zaman.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia karena memberikan individu kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup (Todaro dan Smith, 2015). Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pendidikan juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pandangan serupa diungkapkan oleh Becker (1964), yang menyoroti bahwa investasi di bidang pendidikan adalah bentuk investasi pada modal manusia, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan suatu negara. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas pilihan individu, yang diukur melalui tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi atau daya beli. Pendidikan menjadi elemen penting dalam IPM karena memiliki dampak langsung pada dua aspek lainnya, yaitu kesehatan dan pendapatan. Sebagai ilustrasi, peningkatan tingkat pendidikan sering kali berhubungan dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan serta peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

Meskipun alokasi anggaran publik untuk pendidikan terus mengalami peningkatan di banyak negara, persoalan efisiensi sering menjadi bahan perdebatan. Berdasarkan pandangan Musgrave dan Musgrave (1989), efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik merujuk pada sejauh mana sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam ranah pendidikan, efisiensi pengeluaran publik dapat dievaluasi dari bagaimana anggaran yang disediakan mampu meningkatkan mutu dan akses pendidikan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesia, alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan telah mencapai 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kendati demikian, tantangan utama terletak pada memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun IPM Indonesia menunjukkan peningkatan secara keseluruhan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi masalah yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran pendidikan belum merata di berbagai daerah.

Hanushek dan Woessmann (2008) berpendapat bahwa kualitas pendidikan lebih vital daripada jumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Mereka menjelaskan bahwa peningkatan hasil pendidikan, yang dapat diukur melalui skor tes internasional, memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menganalisis efisiensi, perhatian tidak hanya pada besarnya anggaran, tetapi juga pada cara pengalokasian dan penggunaan anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Psacharopoulos (1985) yang menyebutkan bahwa pengeluaran dalam sektor pendidikan

memberikan tingkat pengembalian sosial yang tinggi, khususnya di negara-negara berkembang. Namun, tingkat pengembalian tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana efisiensi sistem pendidikan dan pengelolaan anggaran publik. Jika anggaran pendidikan tidak dikelola dengan efektif, meskipun terdapat alokasi dana yang besar, pencapaian hasil yang diinginkan akan sulit tercapai.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengeluaran Publik**

Pengeluaran publik merujuk pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Nahumuri (2019), pengeluaran publik adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas yang berhubungan dengan tujuan negara. Efisiensi dalam pengeluaran publik sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yetmi (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran publik yang efisien akan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan mendorong peningkatan ekonomi yang lebih baik. Efisiensi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Handayani (2015) menyatakan bahwa pengeluaran publik yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan yang berisiko merugikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan pengeluaran publik yang baik dapat memberikan dampak positif pada pembangunan manusia, yang akhirnya akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Schultz (1961) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan berperan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan yang baik mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, inovasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, yang menjadi kunci penting dalam persaingan global saat ini. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju tingkat yang lebih maju.

Investasi dalam bidang pendidikan sangat penting, sehingga pemerintah perlu membangun fasilitas dan sistem pendidikan yang berkualitas. Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan mencerminkan bentuk nyata investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan di sektor ini dapat digunakan untuk menyediakan infrastruktur pendidikan serta memberikan layanan pendidikan yang merata kepada seluruh penduduk Indonesia. Komitmen pemerintah terlihat melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak signifikan pada perkembangan pendidikan, terutama melalui peningkatan jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang semakin baik memudahkan individu usia kerja dalam memahami, mengimplementasikan, dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini pada akhirnya mendorong peningkatan standar ekonomi dan kualitas hidup suatu bangsa. Oleh karena itu, sebuah negara perlu mengutamakan investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Meier dalam Winarti, 2014: 41).

---

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Paradigma pembangunan yang berkembang saat ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pembangunan manusia, yang tercermin dari kualitas hidup masyarakat di setiap negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu alat ukur utama untuk menilai kualitas hidup, yang didasarkan pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Dengan meningkatkan ketiga indikator tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan. Menurut Mirza (2012), UNDP (United Nations Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperluas berbagai pilihan bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel yang ada. Penelitian memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti, baik berupa karakteristik maupun suatu kondisi. Salah satu cara dalam melakukan penelitian deskriptif adalah dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka merupakan pengumpulan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terdahulu, seperti buku, artikel jurnal, ataupun laporan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti tanpa harus melakukan pengamatan langsung.

Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan yang ada. Kemudian, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang relevan. Sumber-sumber yang didapatkan kemudian dianalisis untuk menghasilkan pembahasan atas pertanyaan dan permasalahan yang telah ada sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia, bagi masyarakat melalui penjabaran manfaat pembangunan dalam kehidupan dan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan mereka (Yektiningsih, 2018). Pengembangan sistem pendidikan yang efektif dan efisien merupakan suatu komponen krusial dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang mempresentasikan beberapa indikator utama, baik pendapatan rata-rata, tingkat literasi, kesehatan, dan harapan hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik dari suatu penduduk (Muqorrobin & Soejoto, 2017). Di tengah tantangan global dalam meningkatkan standar kemampuan dan hidup manusia, efisiensi pengeluaran publik dalam bidang pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Pendidikan adalah salah satu bentuk investasi sosial yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi maupun sosial suatu negara. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik (Sudarmono et, al. 2021). Investasi pada sektor pendidikan sangat krusial karena dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pendidikan yang berkualitas serta dapat mempengaruhi kehidupan sosial

dan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menghitung sejauh mana tingkat pembangunan manusia dalam suatu negara dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini bukan hanya mencakup aspek standar hidup tetapi juga kesehatan, dan pendidikan. Anggaran dari pengeluaran publik dalam bidang pendidikan dapat dialokasikan pada berbagai sektor seperti infrastruktur pendidikan, program-program pendidikan, serta upah tenaga pengajar yang juga perlu untuk diperhatikan untuk memastikan terwujudnya kualitas pembelajaran yang baik. Upah guru yang adil dan sesuai dengan jasa yang diberikan merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas pendidikan. Sebagian besar guru honorer di Indonesia memiliki gaji yang jauh dibawah upah minimum daerah, padahal peran guru honorer di sekolah sangatlah penting. Selain itu sebagian besar sekolah di Indonesia memiliki jumlah guru honorer lebih banyak dibandingkan guru PNS di tiap sekolah (Fauzan, 2021). Guru yang terlatih dengan baik dan upah terjamin dapat memberikan bimbingan yang maksimal kepada siswa karena adanya balas jasa yang setara. Selain itu, upah yang adil juga berdampak pada meningkatkan loyalitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pengeluaran publik dalam bidang pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mahulauw et, al (2016) diketahui bahwa pengeluaran dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatnya pengeluaran publik dalam bidang pendidikan diharapkan menjadi faktor pendorong dalam terwujudnya pendidikan yang lebih berkualitas dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Efisiensi pengeluaran publik dalam bidang pendidikan dapat dilihat berdasarkan seberapa besar pengaruh yang diberikan terhadap aspek pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran publik yang besar dalam bidang pendidikan dapat dikatakan efisien apabila anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusianya. Namun, jika peningkatan anggaran dari pengeluaran publik dalam bidang pendidikan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusianya maka pengeluaran publik tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Indikator seperti tingkat literasi, kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah, serta lulusan yang siap memasuki dunia kerja mampu mencerminkan sejauh mana pengeluaran publik dalam bidang pendidikan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal yang mendasar untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik yaitu dapat dilakukan dengan pemerataan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat kota ataupun masyarakat desa, baik masyarakat kelas menengah keatas ataupun masyarakat kelas menengah kebawah. Ketimpangan dalam akses pendidikan memberikan dampak yang negatif sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan manusia. Ketimpangan ini disebabkan karena pendidikan yang hanya mampu dirasakan oleh sebagian masyarakat sehingga meninggalkan masyarakat lain yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan. Ketimpangan ini pada gilirannya dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efisiensi atas pengeluaran publik dalam bidang pendidikan pemerintah dapat memberikan fokus investasi pada kualitas tenaga pengajar. Pengajar yang berkualitas memberi peranan yang besar dalam upaya meningkatkan capaian belajar pelajar. Alokasi dana untuk memberikan pelatihan khusus dan peningkatan kualitas pengajaran menjadi sangat penting dalam memastikan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik

---

dan relevan dengan dunia kerja saat ini.

Namun, pengeluaran publik yang besar dalam bidang pendidikan tidak selalu berhasil dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan anggaran tidak dilaksanakan dengan kebijakan yang tepat serta sistem pengelolaan yang baik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas sehingga seringkali terjadi penyelewengan anggaran yang telah ditetapkan untuk bidang pendidikan. Penyelewengan ini bukan hanya memberikan dampak langsung dengan berkurangnya anggaran untuk membangun fasilitas dan aksesibilitas pendidikan, namun juga memberikan dampak pada menurunnya tingkat pembangunan manusia dikarenakan tidak tercapainya kualitas pendidikan yang baik.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan merupakan salah satu investasi sosial yang paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pembangunan manusia. Untuk meningkatkan IPM, pengeluaran publik dalam sektor pendidikan harus efisien dan efektif, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pemerataan akses pendidikan, dan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas SDM karena mampu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah harus digunakan secara tepat untuk mendukung infrastruktur pendidikan, program pendidikan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pengajar. Upah yang adil dan setara dengan kontribusi yang diberikan oleh guru menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan guru, di mana banyak guru honorer dengan gaji yang jauh di bawah standar. Ketimpangan ini memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, sehingga berdampak pada rendahnya IPM.

Pemerataan akses pendidikan juga menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang hanya dapat diakses oleh sebagian masyarakat akan menimbulkan kesenjangan yang lebih besar, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan pembangunan manusia secara merata. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah memastikan pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa, serta dari berbagai kalangan sosial ekonomi.

Secara keseluruhan, efisiensi pengeluaran publik dalam pendidikan harus menjadi perhatian utama untuk menciptakan SDM yang unggul, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan manusia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. *University of Chicago Press*.
- Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A theory of production. *American Economic Review*, 18(Supplement), 139-165.

- Fauzan, A. G. (2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. *Journal On Education* : Volume 04, No. 01, November - Desember 2021, pp. 197-208.
- Handayani, S. (2015). Analisis efisiensi pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). Education quality and economic growth. *World Bank*.
- Mahulauw, K, A., et, al. (2016). PENGARUH PENGELUARAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SERTA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI MALUKU. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*: Vol. 14, No. 2.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163-176.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Muqorrobin, M., Soejoto, A. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* : Volume 5 Nomor 3 (2017).
- Nabilla, dkk (2023). Analisis Pengeluaran Publik Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 233-246.
- Nahumuri, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam A. Z. Ramadhan & D. H. Suryaningrum (Eds.), Analisis Penerapan Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba.
- Pake, S., dkk. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18 (4), 13-22.
- Psacharopoulos, G. (1985). Returns to education: A further international update and implications. *The Journal of Human Resources*, 20(4), 583-604.
- Rifa'i, A. (2021). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap PDB Per Kapita: Spending More or Spending Better. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 211-226.
- Sasongko, H., dkk (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019. *Jurnal Akunida*, 7 (1), 12-29.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Sudarmono, dkk. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* : Volume 2, Issue 1, Januari 2021.
- Suharto, E. (2010). Paradigma pembangunan manusia: Konsep dan implementasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Winarti, R. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(4), 41-54.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.)
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 18 (2), 2018.
- Yetmi, U. S. (2021). Penilaian terhadap efisiensi pengeluaran publik: Tinjauan literature. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 739-753.